

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat penyampaian informasi antara entitas dengan pemakai laporan keuangan. Pelaporan keuangan sangat diperlukan dalam dunia bisnis, karena memuat hal-hal penting yang dihasilkan melalui proses akuntansi.

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian yang memiliki sifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil dari proses tersebut. (Suwardjono, 2013:5).

Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi berupa angka-angka tentang unit-unit usaha ekonomik, yang memiliki sifat keuangan, yang diprediksi dapat memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi menghasilkan informasi bukan hanya untuk kepentingan pengendalian dan pertanggungjawaban namun lebih luas lagi yaitu informasi untuk mempengaruhi pelaku ekonomi dalam perekonomian negara. (Suwardjono, 2013:6).

Akuntansi adalah bahasa bisnis yang disetujui oleh semua pihak sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu organisasi usaha dan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan bisnis bagi semua pihak yang

berkaitan (*stakeholders*), sehingga laporan keuangan yang sudah disajikan haruslah tidak memihak, dapat diandalkan dan tepat waktu. Pelaporan keuangan sudah diatur sedemikian rupa sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Namun, seiring dengan bergantinya waktu, akuntan menemukan banyak celah dalam pendekatan-pendekatan laporan keuangan yang sudah ada, untuk melakukan *fraud* (kecurangan). (Maria I, 2011:4).

Hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya peraturan akuntansi baru yang *principal based* yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standard*). (Sukendar, 2012:94).

International Financial Reporting Standard (IFRS) adalah sebuah standar yang kerangka dan interpretasinya diadopsi oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Banyak standar membentuk bagian dari IFRS yang telah dikenal terlebih dahulu, yaitu *International Accounting Standards* (IAS) yang diterbitkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC), yang pada tanggal 1 April 2001 tanggung jawab diambil alih oleh IASB untuk menetapkan Standard Akuntansi Internasional. Kemudian IASB terus mengembangkan standard yang kemudian disebut sebagai standar IFRS baru. (Sonbay, 2010:2).

Dalam IFRS dikembangkan pendekatan-pendekatan baru pada pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan. Misalnya ditingkatkannya pengungkapan informasi kualitatif transaksi, pengaturan untuk pelaporan keuangan menggunakan *principal based*, yaitu prinsip yang menekankan kepada *professional judgement* bukan lagi *rule based*, dimana akuntan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus berdasar pada prinsip-prinsip yang diatur dengan detail, serta dihapusnya pos-pos luar biasa, penyajian

laporan keuangan diubah untuk mencerminkan sifat laporan keuangan, dan menggunakan pendekatan pengukuran nilai wajar (*fair value*). (Sukendar, 2012:94).

Sebelum digunakannya *International Financial Reporting Standard (IFRS)*, akuntansi di Indonesia masih menerapkan *historical cost* untuk mengukur transaksinya. Dalam konsep ini, pos-pos laporan keuangan diukur berdasarkan *cost* (biaya) pada waktu terjadinya transaksi. Biaya ini kemudian akan menjadi dasar pelaporan besarnya suatu pos untuk periode yang akan datang, selama pos tersebut masih dilaporkan. (Sukendar, 2012:94).

Seiring berkembangnya waktu, penggunaan *historical cost* tidak lagi relevan karena kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan telah terhambat oleh tantangan yang serius. Banyak orang yang berpendapat bahwa standar akuntansi *historical cost* menjadi penyebab rusaknya perekonomian. Negara yang pertama kali mengenalkan konsep nilai wajar adalah Australia, Inggris, dan negara-negara bekas jajahan Inggris. (Sukendar, 2012:94-95).

Permasalahan dari penerapan *fair value* adalah munculnya pendapat negatif atas diterapkannya konsep nilai wajar (*fair value*), dimana adanya krisis keuangan yang dipicu oleh *subprime mortgage* pada semester II 2008. Nilai wajar sempat dijadikan kambing hitam. Disebutkan bahwa sistem akuntansi atau pelaporan keuangan yang menggunakan nilai wajar dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis keuangan. (Sukendar, 2012:95). Secara konseptual, Ijiri dalam Roekhudin (2015) menyarankan *historical cost* dalam akuntansi dibuat untuk mendapatkan akuntabilitas, ketika *fair value* dibuat untuk menyediakan informasi ekonomi yang dapat digunakan untuk pemegang saham. Untuk itu, pendukung *fair value* beranggapan bahwa *historical cost* kehilangan relevannya dan akan segera digantikan oleh *fair value*.

Laux dan Leuz (2010) dalam Khomsatun (2016:968) menyebut bahwa nilai wajar berkontribusi dalam krisis keuangan perbankan *United States*. Kritik tersebut dibantah oleh hasil penelitian Gladney (2011) dalam Khomsatun (2016:968) yang menyebutkan bahwa nilai wajar tidak cukup kuat untuk menjadi penyebab terjadinya krisis keuangan.

Dalam dunia usaha masih banyak yang belum siap karena penerapan *fair value*. Dikarenakan pelaku dalam dunia usaha belum siap melaksanakan keterbukaan informasi yang ada pada perusahaan atau instansi. Dilain sisi, pemerintah atau regulator juga belum benar-benar siap untuk melakukan transparansi atau keterbukaan informasi regulasi kepada publik. Salah satu sektor yang belum siap menerapkan adanya nilai wajar adalah perbankan. Perbankan saat ini belum siap seluruhnya menggunakan nilai wajar. (Sukendar, 2012:101).

Taylor (2009) dalam Khomsatun (2016:968) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan menggunakan nilai wajar menyebabkan kinerja keuangan lebih fluktuatif. Allen dan Carletti dalam Khomsatun (2016:968) menyebutkan bahwa nilai historis masih lebih berguna dibandingkan nilai wajar. Namun penggunaan *historical cost* dipandang akan mengurangi aspek relevansi. Sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. (Sonbay, 2010:8)

Menurut (Nurainie dkk, 2015:40) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *fair value* dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya/wajar dan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki perusahaan dibandingkan jika perusahaan menerapkan *historical cost*.

Dari pemaparan diatas maka penulis bermaksud membuat penelitian dengan tema “Fair Value Measurement: Masalah Baru atau Solusi pada Pelaporan Keuangan (atas Pandangan Auditor Eksternal Versus Pandangan Akademisi)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah peneliti uraikan maka permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana auditor dan akademisi memahami tentang pengukuran nilai wajar dalam laporan keuangan ?
2. Permasalahan apa yang mungkin ditimbulkan dalam penerapan *fair value* ?
3. Solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan karena adanya penerapan *fair value* ?

1.3. Batasan Masalah

Sesuai dengan tema pada penelitian ini, maka penulis hanya membatasi permasalahan yaitu *fair value* dan *historical cost* pada pelaporan keuangan dengan auditor eksternal dan akademisi atau akuntan pendidik sebagai objek penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi penjelasan tentang tujuan penelitian yang lebih jelas atau spesifik yang ingin dicapai peneliti dan hendak dilakukan (Mahsun, 2014:41). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemahaman auditor dan akademisi mengerti tentang *fair value* sebagai pengukuran laporan keuangan
- b. Untuk mengetahui masalah apa saja yang ditimbulkan dari penerapan *fair value*

- c. Memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari penerapan *fair value* pada perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian akuntansi tentang *fair value*(nilai wajar).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui tentang penggunaan *fair value* pada pelaporan keuangan.
- b. Bagi swasta, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan lebih lanjut mengenai penerapan *fair value* pada pelaporan keuangan.